

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024. LAKIP Bapenda merupakan gambaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sebagai institusi penopang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Flores Timur, untuk dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

LAKIP mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat kendali sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja dari setiap unit yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan yang dilaporkan secara transparan kepada masyarakat sebagai perwujudan *good corporate governance*.

Sedangkan dari fungsi pemacu peningkatan kinerja, laporan ini membantu internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan *self assesment* atas kinerjanya guna perbaikan di masa mendatang.

Semoga LAKIP Badan Pendapatan Daerah ini menjadi bahan kajian dan evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaannya di waktu mendatang serta sebagai motivasi bagi semua jajaran aparatur Badan Pendapatan untuk berbenah menata dan memacu kinerja dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Flores Timur,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Flores Timur government. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR". In the center of the stamp, it says "BADAN PENDAPATAN DAERAH". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Drs. Yohanis Djong

Pembina Tk. 1

NIP.19710620 199302 1 002

DAFTAR ISI

	hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3 - 4
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	5 - 6
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	6 - 7
1.3. DASAR HUKUM	7 - 8
1.4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	8 – 10
1.5. ISU-ISU STRATEGIS	11– 12
1.6. KOMPOSISI PEGAWAI	12– 15
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	17 – 18
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	19– 29
BAB IV : PENUTUP	30
LAMPIRAN	
- Form Rencana Kinerja Tahun 2024	
- SK IKU Badan Pendapatan Daerah	
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bapenda TA. 2024	
- Laporan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah TA. 2024	
- Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Flores Timur TA. 2024	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Renstra Tahun 2023-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024. LAKIP Tahun 2024 ini menyajikan keberhasilan maupun faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah. Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Badan Pendapatan Kabupaten Flores Timur semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum.

Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan kinerja sesuai dengan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2023-2026.

Pada tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah juga menetapkan Sasaran Strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026. Daerah yaitu:

- Presentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Target pengukuran kinerja sebesar 5.50% menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari sasaran di atas yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah selama tahun 2024. Pencapaian Kinerja tersebut dilaksanakan melalui 3 program, 11 kegiatan dan 48 sub kegiatan (termasuk kegiatan penunjang) yang capaiannya bisa dilihat pada tabel :

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN KINERJA	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Presentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	6.02	Sangat Baik
	Rata – Rata Capaian	109.45	

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran sbb :

- 1) Pelaksanaan kegiatan Pendapatan tidak berjalan dengan baik karena respon wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan kewajibannya.
- 2) Perlu optimalnya pendataan potensi pendapatan.
- 3) Adanya pemberlakuan PP Nomor 77 Tahun 2020 tentang penghapusan Kapasitas JKN sebagai salah 1 sumber PAD.
- 4) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pendapatan.
- 5) Sarana dan prasarana yang terbatas.

Strategi pemecahan masalah / langkah-langkah yang telah dilaksanakan :

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan sistim pemabayaran secara Online dengan pihak Bank persepsi.
- 2) Memfasilitasi kerjasama dengan pihak Badan Pertanahan untuk dapatkan data transaksi pertanahan secara Online melalui Host to Host.
- 3) Melakukan pembenahan perangkat hukum sebagai dasar melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
- 4) Pengembangan sistem informasi pendapatan berbasis ITE.
- 5) Optimalisasi Pendapatan melalui koordinasi rutin dengan semua instansi pengelola pendapatan daerah.
- 6) Melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari SAKIP, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan dengan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Keputusan MENPAN RB No. 29 Th.2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Meningkatkan kapasitas Pendapatan Asli Daerah yang makin optimal

- b. Meningkatkan potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
- c. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya
- d. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima terhadap masyarakat.
- e. Meningkatkan modernisasi informasi layanan Pendapatan Asli Daerah.

1.3. DASAR HUKUM

Penyusunan LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
 2. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2004, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur;

1.4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur kemudian dipecah menjadi dua yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bid. Keuangan Sub Pendapatan Asli Daerah.

B. Tugas Pokok Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sub urusan pendapatan.

C. Struktur Organisasi

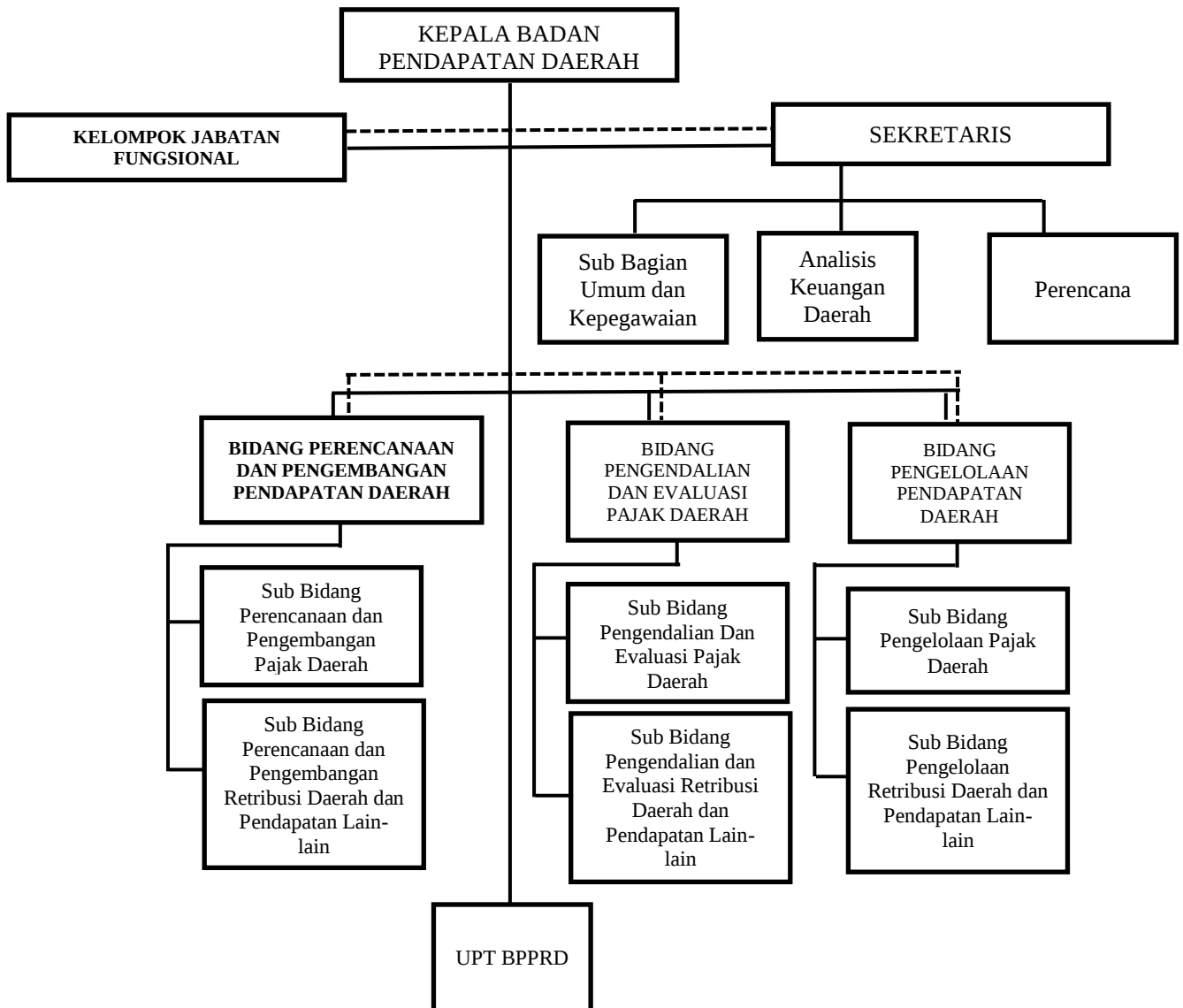
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur diatur Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan**
- 2. Sekretaris**, yang membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Analisis Keuangan Daerah
 - c. Perencana
- 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah**, yang membawahi :
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
 - b. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
- 4. Bidang Pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah**, yang membawahi :
- a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
- 5. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**, yang membawahi:
- a. Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional**
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.**

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASIBADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**



1.5. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sehingga Visi, Misi, Program dan Kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur antara lain:

- Belum optimalnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah;
- Rendahnya penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menghadapi Isu-isu strategis di dalam Badan Pendapatan Daerah, maka ada beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam penyelesaian isu-isu strategis ini.

Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. *Didukung oleh SDM yang Profesional*

Badan Pendapatan Daerah sebagai institusi Perangkat Daerah mengemban fungsi manajemen di Badan Pendapatan Daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan sebagai manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan.

Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan. Di sini Sumber Daya Aparatur Yang Profesional memiliki posisi yang penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan pendapatan yang baik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Berbasis kondisi lokal

Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah, akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Mendukung Kebijakan Desentralisasi fiskal

Pendapatan Asli Daerah harus tetap pada kerangka dan arah desentralisasi fiskal merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan Otonomi Daerah untuk mengelola dan menggerakkan semua potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah untuk mewujudkan Desentralisasi Fiskal yang semakin meningkat dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pembiayaan pembangunan .

4. Akomodatif terhadap dinamika global

Pendapatan Daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa pendapatan dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah menghadapi arus globalisasi.

1.6. KOMPOSISI PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 40 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 27 orang, P3K sebanyak 9 orang dan tenaga Non PNS/Honorar sebanyak 4 orang, yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah dan Komposisi ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN /KELAS JABATAN	JUMLAH (orang)
1.	IV/C	0
2.	IV/B	2
3.	IV/A	3
4.	III/D	7
5.	III/C	2
6.	III/B	1
7.	III/A	6
8.	II/D	4
9.	II/C	1
10.	II/B	-
11.	II/A	-
12.	I/C	1
13.	IX	8
14.	VII	1
Jumlah		36

Tabel 1.2
Jumlah dan Komposisi ASN berdasarkan Esselon

NO.	ESELON	JUMLAH (orang)
1.	II.b	0
2.	III.a	2
3.	III.b	3
4.	IV.a	11
5.	Pejabat Fungsional	1
6.	Non Eselon	19
TOTAL		36

Tabel 1.3
Jumlah dan Komposisi ASN berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO.	DIKLAT Strktural	JUMLAH (orang)
1.	PIM II	-
2.	PIM III	1
3.	PIM IV	3
4.	Belum Mengikuti PIM	32
TOTAL		36

Tabel 1.4
Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

• ***Pegawai Negeri Sipil :***

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	S2	-
2	S1	11
3	Diploma III	4
4	SLTA	11
5	SLTP	-
6	SD	1
TOTAL		27

• ***Pegawai Kontrak :***

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	S2	-
2	S1	1
3	Diploma III	1
4	SLTA	2
TOTAL		4

Tabel 1.5
Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan berdasarkan Sub Unit

NO.	SUB UNIT	JUMLAH (orang)
1.	Pimpinan/Kepala Badan	1
2.	Sekretariat (<i>PNS</i>)	10
	Tenaga Jasa Pelayanan Umum Perkantoran (TJPUP)	4
3.	Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah (<i>PNS</i>)	4
4.	Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah (<i>PNS</i>)	5
5.	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (<i>PNS</i>)	5
6.	UPT (<i>PNS</i>)	11
Jumlah PNS		36
Jumlah Tenaga Kontrak di Kantor		4
TOTAL SELURUHNYA		40

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.5 Isu Strategis yang dihadapi oleh SKPD
- 1.6 Komposisi Pegawai
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perjanjian dan Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERJANJIAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun, yang memuat sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran dan indikator kinerja masing-masing termuat dalam beberapa program sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Porsi PAD terhadap Total APBD	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	5.50%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. PENGUKURAN CAPAIN KINERJA

Badan Pendapatan Darah Kabupaten Flores Timur melaksanakan penilaian kinerja berpedoman pada Perjanjian Kinerja yang dibuat diawal tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data Kinerja yang hasilnya akan memberikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk perbaikan dan peningkatan di waktu yang akan datang.

Indikator Kinerja (IKU) Utama Badan Pendapatan merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang di emban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan, maka berikut ini diuraikan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pendapatan Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kategori
Meningkatnya Porsi PAD terhadap Total APBD	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	5.50%	6.02%	109.45%	Sangat Baik

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja pada sasaran menggunakan Skala Pengukuran 4 (Empat) Kategori sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Skala Pengukuran Progres Positif

Rentang Capaian	Kategori Capaian
> 100 %	Sangat Baik
75 % - 100 %	Baik
55 % - 75 %	Cukup
< 55 %	Kurang

Pencapaian kinerja sasaran di atas merupakan hasil capaian sasaran-sasaran teknis sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dan penjelasan pencapaian Kinerja di atas dapat disajikan berdasarkan Capaian Sasaran Strategis sebagai berikut :

- ✓ Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Realiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah ini adalah yang dikelola langsung dan menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Kabupaten Flores Timur.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi PAD Tahun 2024 yang dikelola Badan
Pendapatan Daerah

NO	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
A. Hasil Pajak Daerah		17.460.890.000	16.238.747.215,41,-
1.	Pajak Hotel	200.000.000	92.849.640,-
2.	Pajak Restoran	1.884.485.000	1.855.638.356,-
3.	Pajak Reklame	435.505.000	119.919.301,-
4.	Pajak Hiburan	5.000.000	2.500.000 ,-
5.	Pajak Penerangan Jalan	6.000.000.000	7.460.481.187,-
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.850.000.000	3.071.349.487,-
7.	Pajak Air Tanah	20.900.000	3.671.800,-
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.000.000.000	2.806.818.918,41,-
9.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.050.000.000	825.018.526,-
10.	Pajak Parkir	5.000.000	500.000,-
11.	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	0,-
B. Hasil Retribusi Daerah		537.500.000	394.321.570,-
1.	Retribusi Penyewaan Tanah, Bangunan dan Kendaraan Bermotor	452.500.000	379.938.570,-
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	60.000.000	2.016.000,-
3.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	25.000.000	12.367.000,-
C. Lain-lain PAD yang Sah (Denda PBBP2)		10.000.000	1.492.590,56,-
Total		18.008.390.000	16.630.502.383,97,-
Persentasi Pencapaian		92.35%	

- ✓ Meningkatnya Porsi PAD terhadap APBD :

a. Persentasi Kontribusi PAD terhadap APBD:

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur berperan mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Daerah. Tugas Koordinasi dan fasilitasi untuk secara optimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan semua potensi yang dikelola pada masing–masing Instansi pengelola PAD.

Target dan Realisasi pendapatan Daerah dapat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.2.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Pajak Daerah	17.460.890.000,-	16.238.747.215,41,-
2.	Retribusi Daerah	5.728.914.924,-	3.615.273.020,-
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.845.122.715,-	2.013.815.603,-
4.	Lain – lain PAD yang sah	28.264.655.000,-	33.532.531.814,-
	Total Jumlah	55.299.582.639,-	55.400.367.652,42
	Persentasi	100%	100.18%

Pencapaian target dan realisasi pendapatan asli daerah tersebut di atas adalah hasil koordinasi Badan Pendapatan Daerah kepada semua Organisasi Perangkat Daerah pengelola PAD secara keseluruhan .

Dengan demikian Kontribusi Porsi PAD terhadap APBD sebagai berikut :

PAD 2024	APBD 2024	Persentasi
Rp 55.400.367.652,42	Rp 919.442.522.203	6.02%

Dari data yang tersaji di atas dapat dipahami bahwa kontribusi PAD terhadap porsi APBD sudah mendekati target yang ditetapkan namun belum berimbang dengan belanja dimana hanya mampu menyumbang 6,02% dari total belanja.

❖ Masalah dan Kendala yang dihadapi.

- i. Kurangnya Inovasi dan kreatifitas dalam meningkatkan pendapatan
- ii. Kurangnya kesadaran wajib pajak maupun retribusi dalam melaksanakan kewajibannya
- iii. Terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi pendukung.
- iv. Kurangnya tertibnya pengelolaan data wajib pajak kurang bayar (piutang).
- v. Belum dilaksanakan dengan baik penertiban kepada wajib pajak kurang bayar

❖ Strategis

Melakukan evaluasi maupun pengendalian secara berkala dan melakukan koordinasi dengan OPD penghasil PAD.

❖ Rencana Aksi

Beberapa rencana aksi dalam meningkatkan PAD sebagai berikut:

- i. Meningkatkan manajemen data maupun pembayaran berbasis teknologi
- ii. Melakukan sosialisasi terkait regulasi pajak daerah dan retribusi daerah
- iii. Mengembangkan inovasi dalam neningkatkan PAD
- iv. Melakukan penagihan pajak piutang terhadap wajib pajak kurang bayar.

Perbandingan Kontribusi PAD terhadap APBD tahun 2021 s/d 2024

Inikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Kontribusi PAD terhadap APBD	4.33 %	3.60 %	4.07 %	6.02 %

1. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target dan Realisasi .

Biaya kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 untuk mencapai target dan sasaran serta indikator yang ada pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 terdiri dari:

- **Pendapatan** sebesar Rp. 18.008.390.000,- dengan capaian Realisasi Pendapatan sebesar Rp 16.630.502.383,97,- atau 92.35%
- **Belanja Operasional** sebesar Rp.5.901.487.807,- mencapai realisasi sebesar Rp.5.547.297.129,- atau 94 %.
- **Belanja Modal** sebesar Rp. 137.820.665,- mencapai realisasi sebesar Rp. 137.584.170,- atau 99,83%

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang didanai dari Belanja Operasional dan Modal terdiri dari 3 (Tiga) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 48 (Empat Puluh Delapan) Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut pada table dibawah.

Tabel

Target dan Realisasi Program / Kegiatan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

NO	UARAIAAN PROGRAM/KEGIATAN	Rp.			Presentase (%)	SUMBER DANA	OUTPUT	OUTCOME
		PAGU	REALISASI	SISA				
	1	2	3		4	5	6	7
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6,039,308,472	5,684,880,299	354,428,173	94			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,592,182,654	4,301,959,875	290,222,779	94			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66,999,032	63,075,350	3,923,682	94	Dana Alokasi Umum		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,999,630	18,529,200	1,470,430	93	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2Dokumen)	Tersusunnya Rencana Kerja OPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14,999,926	13,801,900	1,198,026	92	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2 Dokumen)	Teersusunnya Dokumen RKA SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	9,999,630	9,903,250	96,380	99	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (4 Laporan)	Tersusunnya Laporan Hasil Capaian Kinerja LKIP,RKT,LPPD,LKPJ,PK
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,999,846	20,841,000	1,158,846	95	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja Pertriwulan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,851,597,792	3,634,782,419	216,815,373	94	Dana Alokasi Umum		

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,759,498,392	#####	212,366,623	94	Dana Alokasi Umum,DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Pengajian PPPK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Sisa Dana Akibat tidak tercapainya Target Capaian Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (37Orang/14Bulan)	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62,100,000	58,300,000	3,800,000	94	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (12 Dokumen)	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29,999,400	29,350,650	648,750	98	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Pertriwulan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19,999,624	17,102,000	2,897,624	86	Dana Alokasi Umum		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9,999,786	8,752,000	1,247,786	88	Dana Alokasi Umum	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (1 Dokumen)	Tersusunnya Dokumen RKBMD SKPD
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,999,838	8,350,000	1,649,838	84	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (1 Laporan)	Tersusunnya Laporan Rekon BMD SKPD
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	108,880,969	100,771,850	8,109,119	93	Dana Alokasi Umum		
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	19,997,024	19,374,750	622,274	97	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (1 Dokumen)	Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	19,999,760	19,429,100	570,660	97	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (1 Dokumen)	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	19,999,980	14,150,000	5,849,980	71	Dana Alokasi Umum	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (1 Dokumen)	Terdatanya Objek subyek Retribusi Daerah
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	14,999,660	14,840,000	159,660	99	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (1 Laporan)	Tersedianya Laporan Pengelolaan dan Pemeliharaan data Retribusi Daerah
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	18,884,685	18,033,000	851,685	95	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (1 Dokumen)	Tersusunnya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah

	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	14,999,860	14,945,000	54,860	100	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (1 Dokumen)	Tersusunya Laporan Retribusi Daerah
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19,999,840	19,813,700	186,140	99	Dana Alokasi Umum		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19,999,840	19,813,700	186,140	99	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (1Dokumen)	TersedianyaDokumen Penilaian Kinerja Pegawai
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182,149,549	157,823,643	24,325,906	87	Dana Alokasi Umum		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,999,609	4,886,468	113,141	98	Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (3 Paket)	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,997,250	14,630,000	5,367,250	73	Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (1 Paket)	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19,998,500	16,821,000	3,177,500	84	Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (1 Paket)	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19,999,770	19,792,775	206,995	99	Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (1 Paket)	Tersedianya Paket Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,499,820	480,000	1,019,820	32	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (1 Dokumen)	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000	13,683,000	6,317,000	68	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (1 Laporan)	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94,655,000	87,530,400	7,124,600	92	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1 Laporan)	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	999,600	-	999,600	-	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Tidak Terlaksananya Penatausahaan arsip dinamis
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135,920,165	135,824,170	95,995	100	Dana Alokasi Umum		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	135,920,165	135,824,170	95,995	100	Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (8 Unit)	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132,638,133	110,525,800	22,112,333	83	Dana Alokasi Umum		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,499,948	748,000	751,948	50	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (1 Laporan)	Tersedianya Jasa Surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68,340,000	48,157,800	20,182,200	70	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (1 Laporan)	Tersedianya Laporan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,998,185	2,970,000	28,185	99	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (1 Laporan)	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59,800,000	58,650,000	1,150,000	98	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 Laporan)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73,997,550	62,240,943	11,756,607	84	Dana Alokasi Umum		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	45,998,950	34,380,443	11,618,507	75	Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (25 Unit)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12,998,600	12,985,500	13,100	100	Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 Unit)	Terpeliharanya Bangunan Kantor
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000	14,875,000	125,000	99	Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (12 Unit)	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH	413,649,000	411,091,280	2,557,720	99			
2.1	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	413,649,000	411,091,280	2,557,720	99	Dana Alokasi Umum		
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	413,649,000	411,091,280	2,557,720	99	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (2 Dokumen)	Terpeliharanya Dokumen Sistem Informasi Pemerintah Bidang Keuangan
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,033,476,818	971,829,144	61,647,674	94			
3.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1,033,476,818	971,829,144	61,647,674	94	Dana Alokasi Umum		
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	9,999,665	9,531,375	468,290	95	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (2 Dokumen)	Tersusunnya rencana Pajak Daerah
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	132,794,495	126,858,000	5,936,495	96	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (2 Dokumen)	Tersediannya Kebijakan Pajak Daerah
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	74,999,986	72,973,350	2,026,636	97	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (1 Laporan)	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	199,999,195	199,393,025	606,170	100	Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (22 Unit)	Tersedianya Sarana dan Prasaran Pungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	84,999,674	78,243,174	6,756,500	92	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	Tersedianya Laporan Hasil Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	19,999,723	18,759,283	1,240,440	94	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (1 Laporan)	Tersedianya Laporan Hasil Basis Data Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19,999,610	18,890,000	1,109,610	94	Dana Alokasi Umum	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (18.000 Obyek Pajak)	Tersedianya Data Obyek Pajak NJOP
Penetapan Wajib Pajak Daerah	54,950,965	53,098,337	1,852,628	97	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (2 Dokumen)	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	83,997,000	68,597,000	15,400,000	82	Dana Alokasi Umum	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (2 Layanan)	Terlaksananya Layanan dan Konsultasi
Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak daerah	29,999,485	28,098,600	1,900,885	94	Dana Alokasi Umum	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (1 Dokumen)	Tersusnya Dokumen Verifikasi Laporan Pajak
Penagihan Pajak Daerah	80,000,000	79,800,000	200,000	100	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (1 Dokumen)	Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	64,999,680	62,425,900	2,573,780	96	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (1 Dokumen)	Tersedianya Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah	59,990,530	41,845,000	18,145,530	70	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (1 Dokumen)	Tersedianya Dokumen Pemeriksaan Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	86,747,090	83,787,400	2,959,690	97	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (1 Laporan)	Tersusnya Laporan Pengawasan
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	29,999,720	29,528,700	471,020	98	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (1 Laporan)	Terlaksananya Perkembangan Elektronifikasi Transaksi

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai Capaian Kinerja.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.

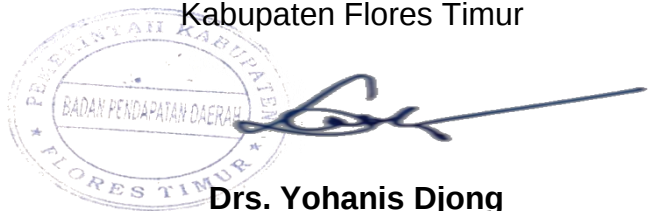
Di masa mendatang, Badan Pendapatan Daerah akan melakukan langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan wujudkan bersama.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi walaupun belum seluruhnya upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar, upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah.

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, telah dilakukan langkah-langkah melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM Aparatur yang profesional, peningkatan yang akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, pelayanan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Flores Timur

The image shows a circular official stamp of the Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Drs. Yohanis Djong
Pembina Tk.1
NIP.19710620 199302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024